

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mimi Cahyani¹, Laili Hurriati², Triana Lidona Apriliani³
^{1,2,3} Universitas Islam Al-Azhar

Correspondent Author: mimigazali09@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of economic growth and general allocation funds on the poverty level in West Lombok Regency in the 2010 to 2015 period. This research is an associative study, research that is analyzing the relationship between two or more variables. This research uses secondary data. Secondary data is data obtained from data collecting institutions and published to the user's data community. Secondary data sought is economic growth data and general allocation funds for the period 2010-2015 obtained through BPS West Lombok Regency. The results of this study indicate that the economic growth variables do not have a significant effect on poverty variables in West Lombok Regency. The general allocation variable does not have a significant effect on poverty variables in West Lombok Regency. Therefore the general allocation fund is expected to be able to increase the rate of economic growth so that the welfare of the West Lombok Regency community is increasing.

Key Word : Economic growth, General allocation funds, The poverty level

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat pada rentang waktu 2010 hingga 2015. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, penelitian yang bersifat menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang dicari adalah data pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum periode 2010-2015 yang diperoleh melalui BPS kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat lebih meningkat.

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum, Tingkat Kemiskinan

Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Pambudi, 2016).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Agusalim, 2018)

Penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sartika, 2016). Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Ukuran ini menitikberatkan perhatiannya pada kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya.

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak pernah terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Ada beberapa macam peranan pemerintah dalam perekonomian, yaitu: *pertama*, peranan alokasi, merupakan peranan pemerintah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi, barang dan jasa dengan tujuan untuk memberikan kepuasan pada masyarakat; *Kedua*, peranan distribusi, merupakan peranan pemerintah dalam rangka mengadakan redistribusi pendapatan atau menstransfer penghasilan; *Ketiga*, peranan stabilisasi, merupakan peranan pemerintah untuk menstabilisasikan perekonomian; Keempat, peranan pemerintah berupa kegiatan yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2019).

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang diukur dari sisi atas harga konstan. PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (Dama, 2016).

Pada periode tahun 2010 sampai 2015 tingkat kemiskinan menurun dari sebesar 23,82% pada tahun 2010 menjadi 19% pada tahun 2014, pada tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 19,14%. Dampak kenaikan harga beras sangat berpengaruh pada peningkatan tingkat kemiskinan. Setiap 10% kenaikan harga beras mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,8%. oleh karenanya, tekanan Inflasi pada harga beras akibat gagal panen dapat memiliki konsekwensi serius bagi yang miskin atau hampir miskin Paparnya.

Keputusan Mendagri no.29/2002 mengisyaratkan bahwa untuk tujuan efektivitas atas pengelolaan dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah Dalam Undang-Undang No. 33/2004 diterangkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan

bukan pajak. Dimana disamping Dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri berupa pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah, maupun penerimaan lain yang sah. Tujuan dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri, tetapi pada prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana alokasi umum memegang peranan yang sangat dominan dibanding sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbang). Untuk itu diharapkan Dana Alokasi umum dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Menurut Priambudi (2017) Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (pemerintah, 2004).

Menurut (Ferdiansyah, 2018) "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Berdasarkan teori yang telah dibahas pada latar belakang, maka akan dilakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2015.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan antara variabel yaitu: hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif (Sugiyono, 2017).

Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini adalah terdapat variabel yang dipengaruhi (*dependent*) yaitu tingkat kemiskinan sedangkan variabel yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum (DAU). (yusuf, 2017)

Penelitian dilakukan pada pemerintah kabupaten Lombok Barat melalui BPS kabupaten Lombok Barat dan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Benuf K & Azhar, 2020). Data sekunder yang dicari adalah data pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum periode 2010-2015 yang diperoleh melalui BPS kabupaten Lombok Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi ($0,558 > 0,05$), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa nilai T hitung $< T$ tabel ($-2,569 < 1,943$). Yang artinya pada model regresi ini hipotesis H_a diolak dan H_o diterima, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati yang berdasarkan pada pengujian hipotesis dan diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.

Secara teoritis, teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan melalui model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Dalam hal ini teori pertumbuhan ekonomi dikembangkan lagi melalui formulasi yang menambahkan variabel tenaga kerja dan faktor teknologi, yang pada kenyataannya teknologi sulit dipisahkan dalam proses produksi dan pembangunan di suatu daerah.

Tidak berpengaruhnya variabel pertumbuhan ekonomi didasarkan pada seberapa besar kontribusi sektor-sektor ekonomi yang belum maksimal dalam menyerap dan memberi kesempatan kerja, seperti yang kita ketahui bahwa sektor ekonomi yang paling dominan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata peranan sekitar 34.58 persen. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mampu mendorong kesempatan kerja tetapi tidak terjadi secara langsung, karena kontribusi sektor ekonomi disuatu wilayah harus seimbang antara pertumbuhan bidang sektoral dan sektor riil.

Pengaruh Dana alokasi umum terhadap kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2015.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1.7 dapat menunjukkan bahwa nilai Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikansi sebesar $(0,83 > 0,05)$, ini berarti bahwa nilai regresi dari Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan $T_{hitung} < T_{tabel}$ $(-2,569 < 1,943)$. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan dengan arti H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima. Pada penelitian ini Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan dan berregresi negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Menurut (Warsito Kawendar, 2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Belanja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama – sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga besar harapan Dana Alokasi Umum dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andyka Arief Pratomo dengan hasil bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta. Dari hasil penelitian ini, Dana Alokasi Umum ternyata mempunyai hubungan negatif dengan Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Kontribusi Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah akan menyebabkan turunnya angka Kemiskinan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan di kabupaten Lombok Barat tahun 2010-2015

Berdasarkan penelitian dengan model regresi linear berganda menggunakan uji signifikansi simultan (uji F) diperoleh hasil dengan nilai Signifikansi $0,136 > 0,05$. berdasarkan nilai F hitung $13,277 > F$ tabel 5,14 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat 2010-2015. Dengan demikian hubungan antara variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan ini berarti H_0 diterima dan H_a diterima. Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh nilai (R^2) sebesar 0,735. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel baik variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum) dengan variabel terikat (Kemiskinan) memiliki kontribusi sebesar 73,50 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada penelitian dengan menggunakan

uji regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2010-2015.

Saran

Islam memandang bekerja bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup semata, tetapi dengan bekerja disyaratkan sebagai bentuk ibadah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik diri-sendiri, keluarga maupun untuk membantu sesama. Seseorang yang mampu bekerja dengan kemampuan dan pengetahuannya dapat meningkatkan martabat dan kemuliaannya. Kebijakan pemerintah dalam megembangkan proses pembangunan ekonomi diharapkan menjadi tolak ukur suatu pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM.

Daftar Pustaka

- Agusalim, L. d. (2018). Trade Openness Effect on Income Inequality: Empirical Evidence from Indonesia . *Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1-14.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* . Yogyakarta: Repository STIE YKPN.
- azwar, s. (2012). *metodologi penelitian*. yogyakarta: pustaka pelajar offset .
- Benuf K & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. gema keadilan .
- Dama, H. (2016). Pengaruh produk domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di kota manado (Tahun 2005-2014). *jurnal berkala ilmiah efisiensi* , 16.
- Dr. Agoes Parera, S. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Rawamangun, Jakarta Barat: PT. Bumi Aksara.
- Ferdiansyah, I. D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 44-52.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pambudi, R. I. (2016). *analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat*. jember : repository universitas jember.
- pemerintah, p. (2004). *Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Diambil kembali dari BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Saputra, A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia*. lampung : repository universitas lampung .

- Sartika, C. B. (2016). Studi faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi Uho*, I(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Warsito Kawendar, A. R. (2008). *Akutansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akutansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- yusuf, M. (2017). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan* . jakarta: kencana.